

Ketidakadilan Ekonomi menjadi Faktor Utama Gagalnya Perdamaian

Trend pertumbuhan ekonomi yang positif dan tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2010 di Aceh ternyata tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan terkonsentrasi pada lapisan dan golongan tertentu saja.

Disisi lain, masyarakat pertanian selaku sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dengan *share* mencapai 26% tidak mendapatkan intervensi yang cukup dari Pemerintah Aceh, baik dari segi modal, regulasi, dan pengembangan teknologi dan infrastruktur. Tidak adanya intervensi terhadap kebutuhan masyarakat pertanian ini secara nyata telah mengakibatkan stagnansi produksi dan ketidakpastian pasar.

Padahal kondisi perekonomian Aceh di tahun 2011 diprediksikan akan semakin krusial. Kondisi krusial itu terkait dengan momentum-momentum yang terjadi pada tahun 2011. Pertama adalah momentum politik dimana pada November 2011 sebagian besar wilayah di Aceh akan melaksanakan pilkada untuk Bupati/Walikota dan Gubernur baru. Pelaksanaan pilkada secara serentak tersebut akan menyedot energi ekonomi dan energi sosial masyarakat secara menyeluruh.

Kedua, tahun 2011 adalah momentum memasuki tahun keenam MoU antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Berdasarkan pengalaman dan teori umum paska konflik, tahun kelima sampai dengan tahun ketujuh adalah masa-masa paling rawan bagi keberlangsungan sebuah perdamaian. Hal ini terkait dengan sejauhmana capaian kedua belah pihak dalam memenuhi tujuan dari perdamaian itu sendiri, terutama pemenuhan harapan masyarakat korban terhadap proses hukum dan keadilan, rehabilitasi ekonomi, dan urusan-urusan integrasi lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa gejolak dan gesekan-gesekan dari masyarakat korban konflik yang intensitasnya cenderung meningkat sepanjang tahun 2010 itu adalah reaksi masyarakat korban dalam menyikapi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, sebagai ketidakpenuhan harapan terhadap tujuan perdamaian itu sendiri.

Oleh karenanya, dalam catatan akhir tahun ini Konsorsium Aceh Baru memberikan penekanan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di Aceh demi terjaminnya keberlangsungan perdamaian.

Banda Aceh, Kamis 30 Desember 2010.

Juanda Djamal, Sec-Gen